



Penguatan Sektor Pariwisata Lokal melalui Penyusunan Peta Potensi Wisata Nagari Simarasok

Strengthening the Local Tourism Sector through the Development of a Tourism Potential Map for Nagari Simarasok

Lestari Setiawati^{1*}, Noviyarsi², Tomi Eriawan³, Nasywa Salsabilla Muldev⁴, Hasanul Fikri⁵,
Alya Arianti Fresta⁶

^{1,2,4,5} Prodi Teknik Industri, Universitas Bung Hatta

^{3,6} Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta

*Penulis Korespondensi: lestarisetiawati@bunghatta.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 22 Juni 2026;

Revisi: 24 Juli 2026;

Diterima: 28 Agustus 2026;

Terbit: 30 September 2026

Keywords: Local Tourism; Nagari Simarasok; Spatial Data; Tourism Potential Mapping; Tourism Village.

Abstract: Nagari Simarasok in Baso District, Agam Regency, has natural, adventure, and rural tourism attractions, but information on their locations and supporting facilities had not been consolidated into an integrated spatial medium. This community service program aimed to develop a tourism potential map as a foundation for local tourism planning and promotion. The activity employed a descriptive-participatory approach through coordination with the nagari government, field observation, coordinate recording, photographic documentation, drone imagery acquisition, base-map preparation, spatial data processing, joint verification, printing, and map handover. The output was a 1:7,100 tourism potential map in the WGS 1984 UTM Zone 47S coordinate system. The map integrates six main attractions with administrative boundaries, roads, rivers, and public facilities. Following verification, the printed map and supporting document were handed over to the Nagari Simarasok Government. The map provides an initial spatial database for setting development priorities, designing visitor routes and tourism packages, improving facilities, and preparing promotional media. Continued updating and community involvement are required to maintain the accuracy and practical value of the map.

Abstrak

Nagari Simarasok di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, memiliki daya tarik wisata alam, petualangan, dan perdesaan, tetapi informasi lokasi serta fasilitas pendukungnya belum dihimpun dalam satu media spasial yang terpadu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyusun peta potensi wisata sebagai dasar perencanaan dan promosi pariwisata lokal. Pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui koordinasi dengan pemerintah nagari, observasi lapangan, pencatatan koordinat, dokumentasi foto, pengambilan citra drone, penyusunan peta dasar, pengolahan data spasial, verifikasi bersama, pencetakan, dan penyerahan peta. Luaran kegiatan berupa peta potensi wisata berskala 1:7.100 dengan sistem koordinat WGS 1984 UTM Zona 47S. Peta mengintegrasikan enam objek utama dengan batas administrasi, jaringan jalan, sungai, dan fasilitas umum. Setelah diverifikasi, peta cetak beserta dokumen pendukung diserahkan kepada Pemerintah Nagari Simarasok. Peta tersebut menyediakan basis data spasial awal untuk menentukan prioritas pengembangan, menyusun rute dan paket wisata, meningkatkan fasilitas, serta menyiapkan media promosi. Pembaruan data secara berkala dan keterlibatan masyarakat diperlukan agar akurasi dan manfaat peta tetap terjaga.

Kata Kunci: Data Spasial; Nagari Simarasok; Pemetaan Potensi; Pariwisata Lokal; Desa Wisata.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang usaha masyarakat. Pemulihan pariwisata global menguat ketika perjalanan wisatawan internasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,4 miliar atau 99% dari tingkat sebelum pandemi (UN Tourism, 2025). Perkembangan tersebut membuka peluang bagi wilayah perdesaan untuk mengembangkan

sumber daya alam, budaya, dan aktivitas masyarakat sebagai produk wisata yang memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga identitas lokal.

Di Indonesia, jumlah usaha objek daya tarik wisata pada tahun 2024 meningkat 17,18%, sementara pendapatannya mencapai Rp11,63 triliun (Badan Pusat Statistik, 2025). Meskipun demikian, pengembangan destinasi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, ketimpangan manfaat, lemahnya dokumentasi potensi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan pariwisata karena itu perlu diarahkan pada tata kelola yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi pengelolaan, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana ditekankan dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Pariwisata perdesaan berpotensi mendiversifikasi pendapatan masyarakat dengan menghubungkan lanskap, budaya, pertanian, kuliner, dan usaha lokal ke dalam pengalaman wisata. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat (Cordova-buiza et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan masyarakat turut memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan (Prayitno et al., 2024)). Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan atraksi, tetapi juga memerlukan data, organisasi lokal, dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. (Ariyani & Fauzi, 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan wisata perdesaan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan terintegrasi yang mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, potensi sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia.

Nagari Simarasok terletak di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 800-1.200 meter di atas permukaan laut, memiliki luas kurang lebih 1.789 hektare, dan terdiri atas empat jorong, yaitu Simarasok, Koto Tuo, Kampeh, dan Sungai Angek. Lanskap perbukitan, aliran sungai, goa alam, kawasan persawahan, dan kehidupan masyarakat Minangkabau menjadi modal pengembangan wisata alam, petualangan, edukasi, agrowisata, budaya, serta ekonomi kreatif. Potensi Simarasok juga telah memperoleh pengakuan melalui pencapaiannya dalam 100 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2026).

Potensi tersebut belum seluruhnya terdokumentasi dan terhubung dalam satu basis informasi spasial. Hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah nagari menunjukkan bahwa informasi tentang nama objek, lokasi, akses, fasilitas, karakteristik daya tarik, dan peluang pengembangan masih tersebar. Kondisi ini menyulitkan pemerintah nagari dan pengelola wisata dalam menetapkan prioritas, menyusun rute kunjungan, merancang paket

wisata, memperkirakan kebutuhan fasilitas, serta menyiapkan bahan promosi yang konsisten.

Peta potensi wisata dapat menjawab kebutuhan tersebut karena tidak hanya menunjukkan lokasi, tetapi juga mengintegrasikan informasi atraksi, akses, fasilitas, dan karakter wilayah. Kajian mengenai Public Participation Geographic Information Systems menunjukkan bahwa pemetaan dapat menghubungkan pengetahuan lokal dengan data spasial serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pariwisata (Gheitasi et al., 2024). Pemetaan partisipatif juga membantu pemangku kepentingan mengomunikasikan pengetahuan wilayah dan memperkuat praktik partisipasi publik (Akbar et al., 2021). Melalui proses validasi bersama, peta yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan nama lokal, jalur yang digunakan, dan kondisi lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan PKM bertujuan menyusun peta potensi wisata Nagari Simarasok melalui inventarisasi potensi, survei lapangan, pemanfaatan citra drone, pengolahan data spasial, serta verifikasi bersama pemerintah nagari dan masyarakat.

2. METODE

Kegiatan PKM dilaksanakan di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Mitra utama adalah Pemerintah Nagari Simarasok dengan keterlibatan perangkat nagari dan pendamping lokal sebagai sumber informasi serta validator data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mencatat karakteristik objek, akses, fasilitas, dan kondisi lingkungan, sedangkan pendekatan partisipatif digunakan dalam penentuan lokasi, penamaan objek, pemeriksaan hasil, dan penyempurnaan peta. Pendekatan tersebut dipilih agar peta tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga sesuai dengan pengetahuan serta kebutuhan pengguna di tingkat nagari.

Data primer diperoleh melalui observasi, pencatatan lokasi, dokumentasi foto, pengambilan citra udara menggunakan drone, dan diskusi dengan mitra. Data sekunder meliputi profil nagari, batas administrasi, jaringan jalan, sungai, fasilitas pemerintahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, serta informasi objek wisata yang telah tersedia. Data lapangan dan data sekunder diintegrasikan ke dalam peta dasar, kemudian diolah untuk menghasilkan simbol, label, legenda, skala, arah utara, dan tata letak peta yang mudah dibaca.

Tabel 1. Tahapan penyusunan peta potensi wisata Nagari Simarasok

No.	Tahap	Kegiatan utama	Luaran
1	Persiapan	Menelaah proposal, membagi tugas, menyusun instrumen, dan menyiapkan peta dasar.	Rencana kerja dan instrumen
2	Koordinasi citra	Menyepakati kebutuhan informasi, lokasi awal, pendamping lapangan, dan jadwal kegiatan.	Ruang lingkup dan dukungan mitra
3	Survei lapangan	Mencatat objek, koordinat, kondisi, akses, fasilitas,	Data primer dan

		dan dokumentasi lokasi.	dokumentasi
4	Akuisisi citra drone	Mengambil gambaran wilayah secara aktual untuk mendukung interpretasi spasial.	Citra udara kawasan
5	Pengolahan spasial	Mengintegrasikan data lapangan, peta dasar, citra, jalan, sungai, dan fasilitas umum.	Draf peta potensi wisata
6	Verifikasi	Memeriksa nama, posisi relatif, simbol, legenda, dan keterbacaan bersama pihak nagari.	Peta yang telah divalidasi
7	Finalisasi dan serah terima	Memperbaiki, mencetak, dan menyerahkan peta serta dokumen pendukung kepada nagari.	Peta final dan bukti serah terima

3. HASIL

Koordinasi dan penentuan kebutuhan informasi

Koordinasi awal dilaksanakan pada 18 Mei 2026 di Kantor Wali Nagari Simarasok. Tim PKM dan perangkat nagari menyepakati tujuan pemetaan, lokasi yang perlu disurvei, pendamping lapangan, kebutuhan data, serta unsur yang harus ditampilkan. Peta disepakati tidak hanya memuat titik wisata, tetapi juga batas nagari dan jorong, jalan, sungai, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta peribadatan. Kesepakatan ini menjadikan peta dapat digunakan untuk memahami hubungan antara objek wisata, akses, dan layanan dasar.



Gambar 1. Koordinasi tim PKM dengan Pemerintah Nagari Simarasok

Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

Pengumpulan data lapangan dan citra drone

Survei lapangan dilakukan pada lokasi yang memiliki fungsi sebagai daya tarik alam, rekreasi air, dan wisata minat khusus. Tim mencatat posisi objek, mendokumentasikan kondisi aktual, mengamati jalur akses, dan menghimpun informasi dari pendamping lokal. Pengambilan citra drone melengkapi pengamatan darat dengan gambaran wilayah yang lebih luas dan aktual. Pelibatan masyarakat membantu memastikan kesesuaian nama tempat, jalur, fungsi lokasi, serta informasi yang tidak selalu tersedia dalam dokumen formal.



Gambar 2. Survei lapangan, dokumentasi objek, dan pengambilan data wilayah

Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

Objek wisata yang dipetakan

Hasil inventarisasi dan verifikasi menetapkan enam lokasi utama untuk ditampilkan pada peta. Pemilihan objek mempertimbangkan kejelasan lokasi, karakter daya tarik, keterkenalan di tingkat nagari, serta relevansinya dengan pengembangan wisata alam dan petualangan.

Tabel 2. Objek wisata utama yang ditampilkan pada peta

No.	Objek wisata	Kategori	Karakteristik
1	Ngalau Agam Tabik	Wisata alam / minat khusus	Goa alam untuk penelusuran dan edukasi geologi.
2	Arung Jeram Simarasok	Wisata petualangan	Titik awal aktivitas arung jeram yang terhubung dengan aliran sungai.
3	Pemandian 7 Saudara	Wisata alam/rekreasi air	Pemandian alam yang berpotensi menjadi bagian rute wisata keluarga.
4	Pemandian Batu Putih	Wisata alam/rekreasi air	Lokasi pemandian dan singgah dengan karakter lanskap perdesaan.
5	Panjat Tebing Batu Putih	Wisata petualangan	Tebing alami untuk aktivitas minat khusus dengan kebutuhan keselamatan.
6	Puncak Bukik Bulek Simarasok	Wisata alam / petualangan	Perbukitan untuk tracking, panorama, dan interpretasi bentang alam.

Produk peta potensi wisata

Produk akhir berupa peta potensi wisata Nagari Simarasok berskala 1:7.100 dengan proyeksi Universal Transverse Mercator, datum horizontal WGS 1984, dan Zona 47S. Peta menampilkan enam objek wisata, batas administrasi, jaringan jalan, sungai, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Legenda, skala grafis, arah utara, sumber data, dan indeks lokasi ditempatkan untuk membantu pembaca memahami informasi secara cepat.



Gambar 3. Peta potensi wisata Nagari Simarasok

Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

Verifikasi dan penyerahan peta

Draf peta diperiksa bersama pihak nagari untuk memastikan ketepatan nama lokasi, posisi relatif objek, kelengkapan simbol, dan keterbacaan informasi. Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan mitra sebelum pencetakan. Setelah finalisasi, peta dan dokumen pendukung diserahkan kepada Pemerintah Nagari Simarasok. Serah terima menandai tercapainya luaran utama tahap pemetaan dan menempatkan nagari sebagai pemilik sekaligus pengguna informasi yang dihasilkan.



Gambar 4. Penandatanganan dan penyerahan peta potensi wisata kepada nagari

Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

4. DISKUSI

Penyusunan peta mengubah informasi yang sebelumnya tersebar menjadi basis informasi spasial yang dapat dibaca secara terpadu. Posisi objek wisata dapat dilihat terhadap jalan, sungai, pusat permukiman, dan fasilitas pelayanan. Kondisi ini mendukung pemerintah nagari dalam mengidentifikasi objek yang relatif mudah diakses, lokasi yang membutuhkan perbaikan sarana, serta peluang menghubungkan beberapa daya tarik ke dalam satu rute kunjungan. Hasil tersebut sejalan dengan kajian (Rizaldi et al., 2024) yang menempatkan pemetaan potensi alam sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pariwisata berkelanjutan. Analisis spasial penting karena persebaran sumber daya wisata perdesaan dipengaruhi oleh kombinasi aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, pasar wisata, dan lingkungan wilayah (Liao et al., 2022).

Keterlibatan pihak nagari dan pendamping lokal memperkuat akurasi sosial peta. Verifikasi bersama mencegah kesalahan penamaan dan membantu menempatkan informasi sesuai dengan pemahaman masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan (Kockelkoren et al., 2023) bahwa pemetaan partisipatif dapat menghimpun persepsi pemangku kepentingan terhadap sumber daya lokal dan mendukung pengambilan keputusan berbasis wilayah. Dalam kegiatan pengabdian, proses partisipatif juga meningkatkan rasa memiliki karena masyarakat tidak hanya menerima produk akhir, tetapi ikut menentukan informasi yang dianggap penting. Namun, partisipasi tidak selalu berlangsung secara otomatis; hambatan operasional, struktural, dan budaya perlu diantisipasi melalui akses informasi, forum dialog, penguatan kapasitas, serta tata kelola yang transparan (Reindrawati, 2023).

Peta juga memiliki fungsi awal sebagai media komunikasi dan promosi. Representasi visual memudahkan pemerintah nagari, Pokdarwis, masyarakat, dan calon mitra memahami sebaran potensi tanpa harus mengandalkan penjelasan lisan yang terpisah. Penggunaan peta untuk sistem informasi wisata telah menunjukkan manfaat dalam menghimpun dan menyajikan data destinasi secara lebih mudah dipahami (Utami, 2021). Jika dikembangkan lebih lanjut, peta dapat menjadi dasar pembuatan papan informasi, peta digital, rute tematik, paket kunjungan, dan konten promosi berbasis lokasi.

Meskipun demikian, produk yang dihasilkan masih merupakan basis informasi awal dan belum menjadi penilaian kelayakan destinasi yang komprehensif. Peta belum memuat daya dukung, kapasitas fasilitas, tingkat risiko, standar keselamatan, waktu tempuh terukur, biaya kunjungan, status pengelolaan, serta kesiapan layanan setiap objek. Aktivitas arung jeram, penelusuran goa, panjat tebing, dan tracking memerlukan asesmen keselamatan dan standar operasional yang lebih rinci. Peta juga perlu diperbarui ketika terjadi perubahan akses, fasilitas, batas administrasi, atau kondisi objek.

Tahap selanjutnya perlu menghubungkan basis data spasial dengan penguatan kapasitas pengelola dan kelembagaan Pokdarwis. Pengembangan desa wisata akan lebih efektif apabila pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media bekerja secara kolaboratif. Karena itu, peta perlu digunakan dalam forum penilaian potensi, penyusunan prioritas, perancangan paket wisata, pengembangan standar pelayanan, dan promosi (Fafurida et al., 2023). Integrasi tersebut akan membantu Nagari Simarasok bergerak dari inventarisasi sumber daya menuju pengelolaan destinasi yang terarah dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan PKM telah menghasilkan peta potensi wisata Nagari Simarasok melalui koordinasi, observasi lapangan, pencatatan lokasi, dokumentasi, pengambilan citra drone, penyusunan peta dasar, pengolahan data spasial, verifikasi, pencetakan, dan penyerahan kepada pemerintah nagari. Peta berskala 1:7.100 tersebut mengintegrasikan enam objek wisata dengan batas administrasi, jaringan jalan, sungai, dan fasilitas umum. Produk ini menjadi basis data awal untuk menetapkan prioritas pengembangan, merancang rute dan paket wisata, merencanakan fasilitas, serta menyiapkan bahan promosi. Keberlanjutan manfaatnya memerlukan pembaruan data secara berkala, penilaian teknis dan keselamatan tiap objek, serta keterlibatan aktif Pemerintah Nagari, Pokdarwis, dan masyarakat dalam pemanfaatan peta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bung Hatta atas dukungan Hibah PKM Internal Tahun 2026, Direktorat Riset – Inovasi, PKM dan Kemitraan Universitas Bung Hatta, Pemerintah Nagari Simarasok yang dipimpin oleh Wali Nagari MHD Nurzen, perangkat nagari, masyarakat pendamping lapangan, serta seluruh pihak yang mendukung proses pengumpulan data, verifikasi dan validasi data serta pihak-pihak lainnya yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PKM ini.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & Maarseveen, M. F. A. M. van. (2021). The Role of Participatory Village Maps in Strengthening Public Participation Practice. *International Journal of Geo-Information*, 10(8), 1–28. <https://doi.org/10.3390/ijgi10080512>
- Ariyani, N., & Fauzi, A. (2023). Pathways toward the Transformation of Sustainable Rural Tourism Management in Central Java , Indonesia. *Sustainability*, 15(3), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su15032592>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik objek daya tarik wisata 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Cordova-buiza, F., Medina-viruel, M. J., & Pérez-gálvez, J. C. (2025). technique analysis study from 2005 to 2023. *Humanities and Social Sciences Communications*, 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04746-7>
- Fafurida, F., Purwaningsih, Y., Mulyanto, M., & Suryanto, S. (2023). Tourism Village Development : Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development. *Economies*, 11(5), 1–15. <https://doi.org/10.3390/economies11050133>
- Gheitasi, M., Salari, N., & Clark, C. (2024). Screening the Use of Public Participation Geographic Information Systems (PPGISs) in the Tourism Industry : A Scoping Review. *Tourism and Hospitality*, 5(4), 1260–1273. <https://doi.org/10.3390/tourhosp5040070>

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan*.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2026). *Desa Wisata Simarasok*. <https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/simarasok>
- Kockelkoren, R., Bermudez-urdaneta, M., Calle, S. R., Kockelkoren, R., & Bermudez-urdaneta, M. (2023). Participatory mapping of local stakeholders ' perceptions of nature ' s contributions to people in an intensified agricultural area in the Colombian Andes. *Ecosystems and People*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/26395916.2023.2279584>
- Liao, C., Zuo, Y., Law, R., Wang, Y., & Zhang, M. (2022). Paths of Rural Tourism Resources in Guangdong Province. *Land*, 11(11), 1–18. <https://doi.org/10.3390/land11112046>
- Prayitno, G., Auliah, A., Rini, I., Ari, D., Effendi, A., Hayat, A., Delisa, A., Siankwilimba, E., Hiddlestone-mumford, J., & Sacco, P. L. (2024). Social capital for sustainable tourism development in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2293310>
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Rizaldi, A. S., Rumanti, A. A., & Andrawina, L. (2024). Sustainable Tourism Industry in Indonesia through Mapping Natural Tourism Potential: Taxonomy Approach. *Sustainability*, 16(10), 4210. <https://doi.org/10.3390/su16104201>
- UN Tourism. (2025). *International tourism recovers pre-pandemic levels in 2024*.
- Utami, W. (2021). Pemetaan Partisipatif Penyusunan Sistem Informasi Wisata. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.31960/caradde.v4i1.799>